

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sangat penting artinya, karena tujuan dalam mendirikan sebuah perusahaan selain untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan, sehingga mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan *good corporate governance* mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka yakin terhadap perolehan keuntungan dari investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Selain itu juga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri (Tri Purwani, 2010).

Tata kelola perusahaan telah menjadi isu yang penting karena kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik merupakan penyebab utama dari kegagalan banyak perusahaan (Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko, 2012). Menurut Syakhroza dalam Bernadinus Chrisdianto (2013) menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan

dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulasi. *Good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur bagaimana suatu organisasi korporasi dikendalikan, diarahkan, dan diminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*) telah didefinisikan sebagai “berkaitan dengan cara-cara yang pengelola keuangan untuk perusahaan menjamin diri mereka sendiri untuk mendapatkan laba atas investasi mereka”. Ini berkaitan dengan masalah konflik kepentingan, cara desain untuk mencegah kesalahan perusahaan dan sejalan dengan kepentingan *stakeholder* menggunakan mekanisme insentif. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah hal yang diinginkan dari liberalisasi pasar untuk memastikan aliran baik modal asing dan dalam negeri untuk percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan investor dan *goodwill*, menjamin transparansi, keadilan, tanggung jawab dan akuntabilitas (Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko, 2012).

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh masalah keagenan. Menurut *agency theory* permasalahan keagenan muncul karena pengelolaan perusahaan yang terpisah dengan pemiliknya. Pemilik (*principal*) sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaannya kepada manajer profesional (*agent*) sehingga kewenangan untuk menggunakan sumber daya perusahaan ada pada tangan manajer. Hal itu dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Manajer dengan

informasi yang dimilikinya bisa bertindak untuk kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi yang tidak dimiliki pemilik. Oleh karena itu diperlukan *corporate governance* untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Corporate governance merupakan seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip manajemen yang beretika. Cadbury Committee yang dikutip Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedarmayanti (2007) menyatakan *corporate governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

Good corporate governance (GCG) merupakan praktik terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme, dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Bernadinus Chrisdianto (2013), konsep *good corporate governance* semakin berkembang dalam upaya memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah dan semakin dinamis serta adanya perkembangan kepentingan *stakeholders* atas perusahaan.

Indriani dan Nurkholis dalam Bernardus Chrisdianto (2013) menyatakan ada beberapa prinsip dasar berkaitan dengan *good corporate governance* yang harus diperhatikan, yaitu: *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) adalah sebagai perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada pihak tertentu yang lebih diperhatikan dalam operasi kegiatan usaha karena semua memiliki hak yang sama dan arus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. *Responsibility* (pertanggungjawaban) berarti kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku. *Accountability* (akuntabilitas) menyangkut kejelasan dari fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Transparency* (keterbukaan informasi) menyangkut keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong

terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan, antara lain semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas; dampak likuiditas bank yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana yang secara besar-besaran; semakin turunnya permodalan bank-bank; banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah; manajemen bank yang tidak professional.

Melihat kondisi bermasalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk

mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Tidak hanya berhenti sampai disitu, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap isu CG, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index penilaian *corporate governance* maupun struktur (mekanisme) *corporate*

governance. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menemukan perbedaan dalam praktik tata kelola perusahaan di berbagai industri, khususnya di pasar negara berkembang. Dari penelitian yang ada selama sepuluh tahun terakhir setelah krisis di Asia, berbagai penelitian lebih banyak difokuskan pada perusahaan non-keuangan dalam rangka untuk mengamati praktik tata kelola perusahaan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Wahyuni Agustina, et. al. (2015) menemukan pengaruh antara *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Yeterina Widi Nugrahanti dan Shella Novia (2012) memproksikan *good corporate governance* menjadi beberapa variabel yaitu kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan, sedangkan kinerja keuangan diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Hasil penelitian Yeterina Widi Nugrahanti dan Shella Novia (2012) menunjukkan bahwa hanya kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Totok Dewayanto (2010) memproksikan *good corporate governance* menjadi beberapa variabel yaitu besar pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan ukuran perusahaan, sedangkan kinerja keuangan diproksikan dengan *return*

on assets (ROA). Hasil penelitian Totok Dewayanto (2010) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai tata kelola perusahaan dengan proksi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan ukuran perusahaan serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur dengan *return on assets* (ROA).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Kepentingan Ilmiah

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana penerapan teori selama di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menambah wawasan di bidang manajemen pemasaran, khususnya di bidang keuangan.

b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian dapat digunakan peneliti lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta digunakan sebagai pembanding pada penelitian mendatang

2. Bagi STIE Perbanas

Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan sehingga dapat disajikan sebagai bahan perbandingan bagi para mahasiswa yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan penelitian sejenis di masa mendatang.

3. Bagi Kepentingan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi bagi perusahaan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Kepentingan (Stakeholders)

Stakeholder menjadi pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Sehingga *stakeholders* perlu mengetahui informasi yang terkait dengan *good corporate governance*, apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang relevan, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV berisi gambaran umum perusahaan, analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji *goodness of fit* dengan uji F, pengujian hipotesis dengan uji t, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran